

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi

Zahara Zaqiah AL Farras*, Dania Meida Rosyidah²

^{1,2)}Akuntansi, Universitas Nusa Putra, Kota Sukabumi, Indonesia

Email: zaharazaqiah13@gmail.com

Abstrak— Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi elemen penting dalam reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akuntansi berbasis akrual dalam praktik pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, telaah dokumen, dan keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas pengelolaan anggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di BPKPD Kota Sukabumi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terutama pada pengakuan pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. Implementasi tersebut didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mampu mengintegrasikan proses perencanaan hingga pelaporan keuangan. Namun demikian, penelitian menemukan beberapa kendala berupa keterlambatan penyampaian data oleh perangkat daerah, sinkronisasi data yang belum optimal, serta perbedaan kompetensi aparatur dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual dipengaruhi oleh integrasi sistem informasi, kompetensi SDM, dan koordinasi antarperangkat daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran empiris mengenai implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah yang memanfaatkan SIPD sebagai sistem terintegrasi dalam pengelolaan APBD.

Kata Kunci: Akuntansi Berbasis Akrua¹, Keuangan Daerah, Akuntansi Pemerintahan, APBD⁴, BPKPD⁵

Abstract— The implementation of accrual-based accounting is a crucial element in public sector financial management reform in Indonesia. This system is designed to produce more relevant and reliable financial information that reflects the government's overall financial condition. This study aims to examine the implementation of accrual-based accounting in regional financial management practices at the Sukabumi City Regional Revenue and Finance Management Agency (BPKPD). The study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, document review, and direct involvement of researchers in regional budget management activities. The results indicate that the implementation of accrual-based accounting has been implemented in accordance with the provisions of Government Accounting Standards, particularly in the process of recognizing regional revenues and expenditures. However, several operational obstacles remain, including delays in transaction recording and suboptimal coordination between regional government agencies. This study concludes that the successful implementation of accrual-based accounting requires strengthening human resource capacity and optimizing regional financial information systems.

Keywords: Accrual-Based Accounting, Regional Finance, Government Accounting, APBD⁴, BPKPD⁵

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Reformasi pengelolaan keuangan publik mendorong pemerintah untuk meninggalkan sistem pencatatan berbasis kas (cash basis) menuju sistem akuntansi berbasis akrual (accrual basis), yang dinilai mampu menyajikan informasi keuangan secara lebih komprehensif. Perubahan tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan negara yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) serta memperkuat akuntabilitas publik. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penyajian laporan keuangan yang lebih informatif dan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut didukung oleh penelitian [1] yang menyimpulkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem pencatatan yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat hak dan kewajiban tersebut timbul tanpa bergantung pada arus kas masuk maupun arus kas keluar. Sistem ini memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan pemerintah

dibandingkan dengan basis kas karena mampu menggambarkan posisi aset, kewajiban, pendapatan, serta beban secara menyeluruh. Menurut [2], penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan, andal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik.

Implementasi akuntansi berbasis akrual juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh [3] menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut [4] dalam penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur agar implementasinya dapat berjalan secara optimal.

Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBD sangat bergantung pada sistem akuntansi yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan. Melalui penerapan basis akrual, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang mengelola keuangan daerah. Aparatur pemerintah dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar akuntansi pemerintahan, prosedur pencatatan berbasis akrual, serta penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [5] yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara tepat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan penelitian tersebut, [6] menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi aparatur yang memadai mendukung penerapan SAP secara optimal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual di BPKPD Kota Sukabumi.

Selain faktor sumber daya manusia, perkembangan teknologi informasi juga mendukung keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual. Pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk mendukung proses pencatatan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi. Pemanfaatan sistem informasi keuangan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian [7] menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian [8] menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual yang didukung sistem informasi dan kompetensi aparatur berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. BPKPD Kota Sukabumi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi aparatur, perubahan regulasi, penyesuaian sistem informasi, serta koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Selain itu, penelitian [9] menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang didukung oleh pengendalian intern yang memadai memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian [10] juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan transparansi, relevansi informasi, dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Temuan

tersebut semakin memperkuat pentingnya implementasi SAP berbasis akrual dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual memerlukan sinergi antara standar akuntansi, sistem pengendalian, dan kompetensi aparatur. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi akuntansi berbasis akrual belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh pemerintah daerah.

Penelitian [11] menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kepatuhan terhadap regulasi, serta sistem informasi yang memadai agar laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan pemerintah. Sementara itu, [12] menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun menggunakan basis akrual memiliki kualitas yang lebih baik, terutama dari aspek relevansi, keandalan, dan kemudahan dipahami, sehingga mampu memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, sebagian besar penelitian berfokus pada pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan atau kompetensi sumber daya manusia. Penelitian yang mengkaji implementasi akuntansi berbasis akrual secara langsung dalam praktik pengelolaan keuangan daerah dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), khususnya pada BPKPD Kota Sukabumi, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Kota Sukabumi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi akuntansi berbasis akrual yang tidak hanya menilai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga mengidentifikasi peran SIPD dan kendala yang dihadapi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi basis akrual dalam penyusunan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan komprehensif berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan selama proses penelitian. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada deskripsi kondisi yang terjadi, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan daerah.

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dengan objek penelitian berupa proses penyusunan dan pelaporan APBD murni yang menerapkan basis akrual. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BPKPD merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, BPKPD dinilai sebagai instansi yang relevan untuk memberikan informasi mengenai implementasi basis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus penelitian diarahkan pada proses penyusunan dan pelaporan APBD murni serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan mengenai implementasi basis akrual dalam penyusunan dan pelaporan APBD murni pada BPKPD Kota Sukabumi.
2. Melakukan studi literatur terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis
3. Menentukan metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus.
4. Mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan partisipasi langsung.
5. Menganalisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.
6. Melakukan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi, dan partisipasi langsung untuk menguji kredibilitas data.
7. Menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
8. Menarik kesimpulan serta menyusun artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, dan partisipasi langsung. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penyusunan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sehingga peneliti memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerapan basis akrual dalam kegiatan operasional pengelolaan keuangan daerah. Dokumentasi dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, partisipasi langsung dilakukan melalui keterlibatan peneliti dalam aktivitas operasional di lingkungan BPKPD Kota Sukabumi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prosedur kerja, mekanisme pencatatan, serta praktik penerapan basis akrual yang berlangsung pada instansi tersebut. Penggunaan ketiga teknik tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan saling melengkapi sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan partisipasi langsung dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik implementasi basis akrual di BPKPD Kota Sukabumi dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaian implementasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pelaporan APBD murni, serta menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan partisipasi langsung. Proses triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Seluruh proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan agar setiap temuan dapat dipahami secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyusunan dan Pelaporan APBD Murni

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam proses penyusunan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan tersebut tercermin pada mekanisme pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika hak pemerintah daerah telah timbul, sedangkan belanja diakui pada saat kewajiban muncul meskipun realisasi pembayaran dilakukan pada periode berikutnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa proses akuntansi tidak lagi berorientasi pada arus kas semata, melainkan telah memperhatikan substansi ekonomi dari setiap transaksi sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan relevan bagi pengambilan keputusan. Penerapan basis akrual juga memungkinkan pemerintah daerah menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan perubahan posisi keuangan secara lebih lengkap dibandingkan dengan basis kas. Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen di BPKPD Kota Sukabumi, pengakuan pendapatan dan belanja telah dilaksanakan sesuai ketentuan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Ringkasan hasil observasi disajikan pada Tabel 1

Table 1 Ringkasan Hasil Observasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di BPKPD Kota Sukabumi

Aspek yang Diamati	Hasil Observasi	Kesesuaian
Pengakuan Pendapatan	Diakui saat hak pemerintah daerah timbul	Sesuai SAP
Pengakuan Belanja	Diakui saat kewajiban muncul	Sesuai SAP
Penggunaan SIPD	Digunakan dalam proses perencanaan hingga pelaporan	Mendukung implementasi
Kendala	Keterlambatan penyampaian data dan koordinasi antarperangkat daerah	Perlu perbaikan

Temuan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di BPKPD Kota Sukabumi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada koordinasi antarperangkat daerah dan ketepatan waktu penyampaian data yang memengaruhi efektivitas penyusunan laporan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penyajian informasi

yang lebih relevan, andal, dan akurat. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual didukung oleh penggunaan SIPD yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pencatatan, hingga pelaporan keuangan. Pemanfaatan SIPD mempermudah pencatatan transaksi, mempercepat konsolidasi laporan keuangan, serta meningkatkan konsistensi data antarperangkat daerah.

Keberadaan SIPD juga memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi keuangan daerah. Sebelum sistem terintegrasi digunakan secara optimal, proses penyusunan laporan keuangan cenderung memerlukan waktu yang lebih lama karena masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah. Dengan adanya SIPD, proses konsolidasi data menjadi lebih cepat sehingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, sistem tersebut membantu meminimalkan kesalahan pencatatan (human error) melalui mekanisme validasi data secara elektronik. Hasil penelitian ini memperkuat temuan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi pemerintah merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan kualitas sumber daya manusia. Penerapan basis akrual merupakan perubahan mendasar dibandingkan sistem berbasis kas sehingga memerlukan pemahaman konseptual dan kemampuan teknis aparatur dalam melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, serta penyajian transaksi keuangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual tidak cukup hanya didukung oleh regulasi dan teknologi, tetapi juga membutuhkan komitmen organisasi, pelatihan yang berkelanjutan, serta pengawasan internal yang efektif. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan komitmen organisasi merupakan determinan utama keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, implementasi akuntansi berbasis akrual di BPKPD Kota Sukabumi telah sesuai dengan SAP dan didukung oleh pemanfaatan SIPD. Penerapan tersebut meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, peningkatan kompetensi aparatur dan koordinasi antarperangkat daerah masih diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi akuntansi berbasis akrual.

3.2 Peran SIPD dalam Penyusunan dan Pelaporan APBD

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan penting dalam mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual di BPKPD Kota Sukabumi. SIPD digunakan untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan sehingga mempermudah proses konsolidasi data antarperangkat daerah.

Pemanfaatan SIPD juga membantu meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan melalui proses pencatatan yang lebih sistematis dan terdokumentasi. Namun, efektivitas sistem informasi tersebut tetap dipengaruhi oleh kualitas data yang dimasukkan oleh setiap perangkat daerah. Temuan ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi serta didukung oleh kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem tersebut.

3.3 Kendala Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Meskipun implementasi akuntansi berbasis akrual telah berjalan dengan baik, penelitian ini menemukan beberapa kendala, yaitu keterlambatan pencatatan transaksi dari beberapa perangkat daerah, sinkronisasi data yang belum optimal, serta perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap konsep basis akrual. Kondisi tersebut menyebabkan proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan memerlukan waktu yang lebih lama.

Keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual tidak hanya dipengaruhi oleh sistem informasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarperangkat daerah, dan komitmen organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan serta penguatan koordinasi antarunit kerja menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.4 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di BPKPD Kota Sukabumi telah mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Meskipun demikian, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan SIPD, serta koordinasi antarperangkat daerah agar implementasi akuntansi berbasis akrual dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan tersebut tercermin dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban berdasarkan basis akrual, sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) turut mendukung proses penyusunan dan pelaporan APBD melalui integrasi data keuangan antarperangkat daerah. Namun, implementasi akuntansi berbasis akrual masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterlambatan penyampaian data dari beberapa perangkat daerah, sinkronisasi data yang belum optimal, serta perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap penerapan basis akrual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan sistem informasi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antarperangkat daerah, dan komitmen organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan SIPD agar kualitas penyusunan dan pelaporan APBD semakin baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi penerapan akuntansi berbasis akrual serta menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

REFERENCES

- [1] L. Rosana and R. W. Bharata, "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan," *Jurnalku*, vol. 3, no. 1, pp. 23–34, Feb. 2023, doi: 10.54957/jurnalku.v3i1.366.
- [2] A. A. Lasabuda, J. Morasa, and V. Z. Tirayoh, "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA," *GOING CONCERN: JURNAL Riset AKUNTANSI*, vol. 15, no. 2, p. 167, Feb. 2020, doi: 10.32400/gc.15.2.28068.2020.
- [3] Rohmadira Aditya, Mohamad Djasuli, Muhamad Arief Priambadha, Akhmad Abimanyu, and Rafly Ardiansyah, "Pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah," *Journal of Social and Economics Research*, vol. 6, no. 1, pp. 174–194, Jun. 2024, doi: 10.54783/jser.v6i1.369.
- [4] S. A. Putra and R. J. Varina, "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu," *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, vol. 1, no. 2, pp. 85–98, Dec. 2021, doi: 10.33701/jtpm.v1i2.2071.
- [5] Barbara Gunawan and Grita Nilakandi, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)," *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, vol. 6, no. 1, pp. 48–64, Feb. 2026, doi: 10.30595/raar.v6i1.29546.
- [6] D. M. Rosyidah, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi)," *Jurnal Multidisiplin West Science*, vol. 2, no. 08, pp. 615–635, Aug. 2023, doi: 10.58812/jmws.v2i08.566.
- [7] N. Atharizka, Y. Nurjanah, and T. Andrianto, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Informatika Kesatuan*, vol. 1, no. 2, pp. 107–118, Dec. 2021, doi: 10.37641/jikes.v1i2.889.
- [8] Annisa, S. Syamsuddin, and A. Rusli, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, vol. 23, no. 01, pp. 12–23, Apr. 2025, doi: 10.21831/jpai.v23i01.83479.
- [9] M. Sekar Sari, D. Silvia, and A. E. Putri, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 20, no. 2, pp. 194–201, Oct. 2023, doi: 10.31849/jieb.v20i2.16202.

- [10] Fipiariny. S and Rahmi Aminus, “Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang),” *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, vol. 3, no. 2, pp. 792–796, Jun. 2025, doi: 10.61994/equivalent.v3i2.1138.
- [11] A. Rahayu, I. Nurodin, and S. Sulaeman, “Analysis of Accrual-Based Government Accounting Standards Application to The Financial Reports of Regional Public Service Agency (BLUD),” *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, vol. 8, no. 2, pp. 100–109, Aug. 2023, doi: 10.22437/jaku.v8i2.27090.
- [12] A. P. Karunia, P. Payamta, and S. Sutaryo, “The Implementation of Accrual-based Accounting in Indonesian Government: Has Local Government Financial Statement Quality Improved?,” *Journal of Accounting and Investment*, vol. 20, no. 2, 2019, doi: 10.18196/jai.2002115.